

INSTRUMEN DAN DAMPAK PADA KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN PROTEKSI: ANALISIS DAN IMPLIKASI

Viny Malindha Mardlatillah¹, Firdaus Nabila Husna², Muhammad Rudiyanto³, Sarpini⁴
Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
mardlatillahviny@gmail.com¹, firdafh2711@gmail.com², rudi.xyz12@gmail.com³,
sarpini@uinsaizu.ac.id⁴

ABSTRAK

Kebijakan perdagangan dan proteksi sangat penting bagi ekonomi global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengatur arus barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan perdagangan dan proteksi terhadap pembangunan industri di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sering berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi global dan kebutuhan domestik. Kebijakan proteksi membantu melindungi produk domestik dari persaingan impor, menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik bagi industri nasional, dan mendukung industri kecil.

Kata Kunci: Kebijakan Perdagangan, Proteksi, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Trade and protection policies are very important for the global economy, especially in developing countries like Indonesia. This policy aims to accelerate economic growth by regulating the flow of goods and services, as well as improving community welfare. This research uses qualitative analysis to explore the impact of trade and protection policies on industrial development in Indonesia. The results show that these policies change frequently to adapt to global conditions and domestic needs. Protection policies help protect domestic products from import competition, create a better business environment for national industries, and support small industries.

Keywords: Trade policy, protection, economic growth

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Kebijakan perdagangan dan proteksi adalah dua elemen penting dalam strategi ekonomi suatu negara, yang berfungsi untuk mengatur arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam neraca perdagangan, tetapi juga melindungi sektor industri dalam negeri dari persaingan

yang tidak sehat. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, penerapan kebijakan perdagangan yang efektif memerlukan penyesuaian yang cermat terhadap tujuan pembangunan nasional serta dinamika ekonomi internasional. Proteksi sering kali menjadi bagian dari upaya negara untuk menjaga kemandirian ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan industri dalam negeri di tengah persaingan global yang ketat. Di era globalisasi, kebijakan perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali dihadapkan pada dilema antara mendorong perdagangan bebas untuk memacu pertumbuhan ekonomi atau menerapkan proteksi guna melindungi sektor-sektor strategis. Kebijakan perdagangan dan proteksi memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek perekonomian, seperti industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai instrumen kebijakan ini, baik dalam bentuk tarif, kuota, maupun subsidi, menjadi relevan untuk memahami peranannya dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Czinkota berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal yang melintasi batas negara. Ekspor berarti menjual atau mengirimkan barang atau jasa ke luar negeri dan impor berarti membeli dan menerima barang dan jasa dari luar negeri. Menurut Ibrahim (2017), saat ini setiap negara yang terlibat dalam hubungan perdagangan internasional memiliki ketergantungan satu sama lain. Bahkan Ibrahim mengatakan bahwa di era globalisasi saat ini, negara-negara harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Mulya & Saputro, 2024)

Dalam bukunya yang berjudul *Principal of Political Economy and Taxation* (1817), David Ricardo mengemukakan pendapatnya tentang perdagangan internasional melalui salah satu teorinya yang berpengaruh pada dunia ilmu ekonomi sampai saat ini yaitu, teori tentang keuntungan komparatif. Ricardo menciptakan perbedaan antara harga perdagangan dalam negeri dan harga perdagangan internasional. Salah satu asumsi yang mendasari pemikiran Ricardo adalah sebagai berikut: (1) dua negara dan dua komoditi; (2) perdagangan bebas; (3) tenaga kerja bebas yang dapat bergerak secara bebas di dalam suatu negara tetapi tidak secara internasional; (4) biaya produksi tetap; (5) biaya transportasi nol; (6) tidak ada perkembangan teknologi; (7) teori nilai tenaga kerja; dan (8) pasar persaingan yang (Jamly, & Rizaldy, 1998)

Proteksionisme merupakan sebuah kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan antar negara melalui metode seperti tarif barang impor, restriksi kuota dan berbagai aturan restriksi lainnya, yang mana dirancang untuk mencegah impor dan pengambilalihan pasar domestik oleh asing.

Kebijakan proteksionis ini pada awalnya bergeser seiring dengan kemunculan liberalisasi pasar yang memperkenalkan konsep free trade, namun di tahun 1970an, kebijakan ini kembali muncul dengan istilah baru yaitu new protectionism. Kembalinya proteksionisme ini mengacu pada kebangkitan merkantilisme yang mana, negara-negara khususnya negara industri berusaha untuk memecahkan atau mengurangi masalah pengangguran mereka hingga ketertinggalan pertumbuhan dengan memberlakukan pembatasan impor dan mensubsidi ekspor (Dominick Salvatore, 1993:1). Pendefinisian proteksionisme oleh Philip L. Levy lebih lanjut dikategorikan

berdasarkan intensi (intent), yaitu diantaranya intentional protectionism, incidental protectionism dan instrumental protectionism. (Sari et al., 2013)

METODE PENELITIAN

Kami menggunakan metode penelitian deskriptif untuk melakukan penelitian ini, untuk memberikan gambaran, penjelasan atau menggambarkan sebuah data atau keadaan metode penelitian deskriptif kami anggap sebagai metode yang cocok untuk di gunakan. Kami juga menggunakan metode penelitian literatur review untuk mebuat kajian literatur dan mencari sumber bacaan yang sesuai dengan penelitian kami.

Dan kami melakukan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kritis setiap sumber data, informasi atau bacaan yang kita temukan dengan topik pembahasan Dampak pada kebijakan perdagangan dan proteksi : Analisis dan implikasi. Tahapan penelitian yang kita gunakan yaitu pertama dengan library research dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan menganalisis data data yang kita temukan, yang dimana data tersebut sesuai dengan topik pembahasan yang kita ambil. Kemudian hasil dari analisis data tersebut di tuangkan dala bentuk narasi. Penjelasan tentang sumber data yang digunakan, termasuk jurnal, laporan, dan data dari lembaga terkait. Dengan mengumpulkan beberapa data dan teori dari berbagai sumber, penulis menganalisis data fenomenologis yang relevan dengan topik yang dibahas sehingga dapat digunakan sebagai sumber baru yang akurat dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Perdagangan dan Proteksi

Kebijakan ekonomi global mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap pola dan strategi pembangunan industri. Beragam regulasi perdagangan yang diadopsi oleh negara-negara berkembang sangat bervariasi, dan sering kali negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, melakukan perubahan pada kebijakannya. Variasi dalam kebijakan perdagangan ini dapat berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari perdagangan dan perkembangan industri yang berbeda-beda. Kebijakan perdagangan seharusnya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan industrialisasi, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan langkah-langkah terkait perdagangan harus disesuaikan dengan tujuan industrialisasi negara serta sasaran pembangunan secara umum, dan dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan lain yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan perdagangan dapat didefinisikan sebagai strategi yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi dengan cara:

- a. Memungkinkan negara berkembang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari perdagangan.
- b. Meningkatkan laju akumulasi modal.
- c. Mendorong industrialisasi.
- d. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Menurut Haberler, perdagangan internasional telah memberikan kontribusi yang luar biasa dan merupakan kebijakan terbaik bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang pada abad ke-19 dan ke-20, dengan harapan kontribusi tersebut akan terus berlanjut di masa depan. (suharto, 2002) Perdagangan internasional adalah perdagangan

yang memberikan peranan penting bagi para pedagang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Melalui mereka, produk-produk dapat didistribusikan kepada konsumen. Pedagang melakukan pembelian barang untuk menjualnya kembali tanpa mengubah jenis atau bentuknya, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ini dinamakan perdagangan. Sekarang, aktivitas perdagangan telah menjadi sangat luas dan tidak hanya berlangsung secara domestik tetapi juga mencakup wilayah antarnegara, terkait puladengan adanya eksportir dan importer. (Nuri Aslami, 2022)

Secara umum, proteksi dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi sektor ekonomi atau industri domestik dari persaingan yang berasal dari luar negeri. Definisi lain menyatakan bahwa proteksi berarti perlindungan dalam konteks perdagangan atau industri. Kedua definisi ini saling melengkapi, di mana sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri domestik, mendapatkan perlindungan pemerintah dari persaingan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa produksi dalam negeri kurang efisien dibandingkan dengan barang impor. Tanpa adanya perlindungan tersebut, sektor ekonomi domestik akan kesulitan bersaing dengan produk-produk asing. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Proteksionisme atau Proteksi Perdagangan. Dalam konteks perdagangan dunia yang sedang menuju liberalisasi, proteksionisme masih menjadi alternatif kebijakan perdagangan. Proteksionisme dibagi menjadi dua jenis: *Old Protectionism*, yang melibatkan penggunaan instrumen pembatasan perdagangan internasional seperti tarif dan kuota impor, serta *New Protectionism*, yang bermula setelah periode liberalisasi perdagangan pasca-Perang Dunia II. Penerapan *New Protectionism* menyaksikan meningkatnya trend pembatasan perdagangan non-tarif. (Parulian et al., 2020)

Proteksionisme adalah suatu perspektif dalam perdagangan yang telah ada sejak ratusan tahun sebelum Masehi, tercermin dalam filosofi Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa membiarkan perdagangan asing masuk ke dalam polis (negara- kota) dapat merusak jiwa (kehidupan). Aristoteles juga menyatakan bahwa kondisi ideal bagi suatu negara adalah kemandirian (self-sufficient). Berbagai bentuk pertukaran produk domestik dengan uang dari luar hanya akan memberikan dampak negatif bagi negara. Hingga kini, filosofi proteksionisme yang membatasi kompetisi perdagangan tetap menjadi salah satu dasar dalam kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan perdagangan antar negara dengan menerapkan berbagai metode, seperti pengaturan perdagangan, penerapan tarif bea masuk untuk barang impor (tarif protection), pembatasan kuota (non-tarif protection), serta sistem kenaikan tarif dan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan melarang impor. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi industri domestik dengan cara membatasi masuknya barang-barang dari luar negeri. Proteksionisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, di mana bentuk utama dari proteksionisme adalah pembatasan impor melalui penerapan tarif, kuota, dan sanksi perdagangan. (Wadiah Ulfiah Amba Syam, 2020)

2. Instrumen Kebijakan Perdagangan dan Proteksi

Instrumen kebijakan perdagangan dan proteksi adalah berbagai alat atau cara yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan arus barang dan jasa yang masuk atau keluar dari negaranya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah

untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan mencapai tujuan ekonomi lainnya. Dalam konteks kebijakan perdagangan dan proteksi, terdapat berbagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Berikut merupakan jenis-jenis instrument pada kebijakan perdagangan internasional:

a. Tarif

Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya \$6 untuk setiap barel minyak). Tarifold Valorem (od Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tarif 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

b. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase dari nilai yang diekspor). Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.

c. Pembatasan Impor

Pembatasan impor (Import Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya.

d. Pengekangan Ekspor Sukarela

Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela (Voluntary Export Restraint), yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (Voluntary Restraint Agreement=ERA). VER adalah suatu pembatasan (Kuota0 atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingkan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tariff menjadi (rent) yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.

e. Persyaratan Kandungan Lokal

Persyaratan kandungan lokal (local content requirement) merupakan pengaturan yang

mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS ditahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestic. Ketentuan kandungan local telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang berikhtiar mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (intermediate goods). Di amerika serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini belum diberlakukan.

f. Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Amerika Serikat seperti juga kebanyakan negara, memiliki suatu lembaga pemerintah, export-import bank (bank Ekspor- impor) yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.

g. Pengendalian Pemerintah (National Procurement)

Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah, pemasok domestic meskipun jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.

h. Hambatan-Hambatan Birokrasi

Terkadang pemerintah pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah Surat Keputusan Pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif membatasi realiasi sampai jumlah yang relatif amat sedikit. (n.d.)

Selain kebijakan perdagangan internasional, adapula instrument dari kebijakan proteksi, diantaranya:

a. Tarif Impor

Tarif Impor adalah salah satu alat utama yang digunakan pemerintah ketika ingin memberlakukan kebijakan proteksionisme. Secara umum, semua bentuk tarif impor dibebankan ke negara pengimpor dan didokumentasikan di bea cukai pemerintah. Tarif impor akan menaikkan harga impor untuk suatu negara.

b. Kuota Impor

Kuota impor adalah hambatan non-tarif yang diberlakukan untuk membatasi jumlah produk yang dapat diimpor selama periode waktu tertentu. Tujuan dari pembatasan kuota adalah untuk membatasi pasokan produk tertentu yang disediakan eksportir ke importir.

c. Standar Produk

Keamanan produk atau bahan berkualitas rendah biasanya menjadi perhatian utama ketika standar produk diberlakukan. Proteksionisme standar produk dapat menjadi penghalang yang membatasi impor berdasarkan kontrol internal suatu negara. Oleh karena itu, membatasi impor melalui penerapan standar produk sering kali dapat meningkatkan volume produksi di dalam negeri.

d. Subsidi Pemerintah

Pejabat pemerintah dapat memilih untuk memberikan subsidi langsung atau tak langsung di bidang produksi, ketenagakerjaan, pajak, properti, dan lainnya. Pejabat maupun negara dapat memilih untuk menawarkan subsidi ke suatu bisnis untuk melakukan ekspor jika ingin meningkatkan neraca perdagangan suatu negara. Subsidi ekspor memberikan insentif bagi bisnis domestik untuk berekspansi secara global dengan meningkatkan ekspor mereka secara internasional. ("Tujuan Kebijakan Proteksi Dalam Perdagangan Internasional," 2024)

3. Dampak Kebijakan Perdagangan dan Proteksi

Kebijakan perdagangan dan proteksi bertujuan untuk melindungi industri domestik, meningkatkan lapangan kerja, dan mengatur volume impor dan ekspor. Proteksionisme, melalui tarif dan kuota dapat meningkatkan harga barang domestik tetapi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kebijakan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dalam negeri, meskipun dapat mengganggu daya saing jangka panjang. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk merancang strategi yang lebih efektif di masa depan. Kebijakan perdagangan dan proteksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kebijakan ini dapat berupa tarif, kuota impor, subsidi, dan berbagai bentuk pembatasan perdagangan lainnya. (Rusydziana, n.d.)

Dampak Positif Kebijakan Proteksi; 1.) Perlindungan Industri Dalam Negeri Kebijakan proteksi ini dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari produk impor. Hal ini memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan menjadi kompetitif. 2.) Penciptaan Lapangan Kerja Dengan melindungi industri dalam negeri, kebijakan proteksi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempertahankan lapangan kerja yang sudah ada. 3.) Peningkatan Pendapatan Negara Kebijakan proteksi seperti tariff dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan bea masuk. 4.) Kemandirian Ekonomi Kebijakan proteksi dapat mengurangi ketergantungan pada produk dan meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara.

Dampak Negatif Kebijakan Proteksi; 1.) Peningkatan Harga Kebijakan proteksi dapat menyebabkan harga barang dalam negeri menjadi lebih tinggi karena adanya pembatasan impor. Hal ini dapat membebani para konsumen. 2.) Efisiensi Rendah Kurangnya persaingan akibat kebijakan proteksi dapat menyebabkan industri dalam negeri menjadi kurang efisien. 3.) Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan proteksi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena dapat mengurangi investasi asing langsung dan inovasi. 4.) Perselisihan Perdagangan Kebijakan proteksi yang berlebihan dapat memicu perselisihan

perdagangan dengan negara lain dan berpotensi memicu perang dagang. (Nurchahyo & Nugroho, 2023)

Tujuan Kebijakan Perdagangan; 1.) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. 2.) Menciptakan peluang lapangan kerja disektor yang berkembang. 3.) Mendorong dalam mengembangkan produk dan layanan baru melalui persingan global. 4.) Meningkatkan kualitas produk dan inovasi. (Salam & Rayadiani, n.d.)

KESIMPULAN

Kebijakan perdagangan dan proteksi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang memberikan peranan penting bagi para pedagang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Melalui mereka, produk-produk dapat didistribusikan kepada konsumen. Pedagang melakukan pembelian barang untuk menjualnya kembali tanpa mengubah jenis atau bentuknya, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ini dinamakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan berfungsi sebagai alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pasar, akumulasi modal, dan industrialisasi. Namun, penerapan kebijakan proteksi, seperti tarif dan kuota, juga diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri yang tidak sehat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan proteksi dapat memberikan perlindungan jangka pendek bagi industri domestik, ada risiko terkait seperti peningkatan harga barang dan penurunan efisiensi industri akibat kurangnya kompetisi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan menjaga daya saing jangka panjang.

Hal ini juga menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perdagangan dan proteksi yang diterapkan. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih efektif. Kebijakan perdagangan dan proteksi harus dirancang dengan hati-hati agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional tanpa mengorbankan daya saing jangka panjang industri domestik. Pemerintah sebaiknya mengintegrasikan kebijakan perdagangan dan proteksi dengan strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Ini termasuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap daya saing industri domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamly, a. j., a., & Rizaldy, r. (1998). Kinerja Komoditas Elektronik Indonesia 1981-1995: Pendekatan Keunggulan Komparatif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 13(3), 7.
- Mulya, h. f., & Saputro, g. e. (2024). *Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*.
- Nurchahyo, m. a., & Nugroho, a. s. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1), 55–75. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2100>
- Nuri Aslami, n. s. a. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy And Currency Study (Jecs)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.358>

- Parulian, r. t., Mintarja, k., & Alexander, s. c. (2020). Dampak Kebijakan Komoditas Pangan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Dinamika Perekonomian Global. *Jurnal Sentris*, 1(2), 137–158. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4308.137-158>
- Rusydiana, a. s. (n.d.). *Perdagangan Internasional*:
- Salam, a. r., & Rayadiani, s. (n.d.). *Ij-Epa Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia - Jepang*.
- Sari, n. p. a. a., Suwecawangsa, a. p., & Parameswari, a. a. a. i. (2013). *Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Impor Panel Surya Tiongkok Tahun 2013*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/68939/37961>.
- Scherly. (n.d.). *Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional*. *Binus University*.
- Suharto, Toto. (2002). Kebijakan Ekonomi Global Di Negara Sedang Berkembang; Tinjauan Teori, Problematika Dan Interaksi Kebijakan Perdagangan Dan Industrialisasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3, 91–110.
- Tujuan Kebijakan Proteksi Dalam Perdagangan Internasional. (2024, January). *Berita Bisnis*.
- Wadiyah Ulfiah Ambas Syam, Andi. (2020). Dampak Kebijakan Proteksi Indonesia Pada Bidang Waralaba Asing (Studi Kasus: Kentucky Fried Chicken). *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 05.